

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam diantaranya sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya namun pada tahun 2009 sampai tahun 2011 tidak mencapai target yang ditetapkan, dan pada tahun 2012 dan 2013 telah mencapai target. Pada tahun 2011 Dinas Pendapatan Kota Batam menerima wewenang dari pusat untuk mengurus BPHTB dan pada 2013 menerima wewenang mengurus PBB-P2 yang diatur dalam undang-undang tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam jika dilihat dari Rasio Efektivitasnya untuk tahun 2009 sampai dengan 2011 berjalan tidak efektif karena persentase yang diperoleh kurang dari 100% yaitu sebesar 84,17%, 80,14% dan 87,57%. Namun pada tahun 2012 dan 2013 berjalan secara efektif karena persentasenya diperoleh melebihi 100% yaitu sebesar 109,15% dan 119,00%.
3. Jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah pada tahun 2009 sampai 2013 tergolong sangat baik, dapat dibuktikan dengan persentase dari setiap tahun diatas

50,00%. Dengan tingkat persentase terendah 75,93% dan tertinggi mencapai 86,53%.

4. Untuk pengukuran Analisis Trend Rasio Efektivitas mengalami peningkatan sebesar 9,87% mulai tahun 2009 sampai 2013. Begitu juga dengan Rasio Pajak Daerah terhadap PAD mengalami peningkatan sebesar 0,46% mulai tahun 2009 sampai 2013. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik untuk masa tahun berikutnya hal tersebut menggambarkan kecenderungan arah penerimaan pajak daerah terhadap PAD cenderung baik.

5.2 Saran

Kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam sudah berjalan dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan target anggaran yang awalnya tidak mencapai target tetapi berjalannya waktu dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batam akhirnya dapat mencapai target. Saran yang diberikan untuk Dinas Pendapatan Kota Batam adalah :

1. Lebih meningkatkan potensi daerah yang akan dapat meningkatkan PAD sehingga semua target anggaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dan kinerja keuangan daerah dapat berjalan dengan baik..
2. Memberi tindakan tegas bagi wajib pajak yang menunggak atau bahkan tidak membayar pajak sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang akan berdampak terhadap kinerja keuangan daerah Kota Batam.

3. Meningkatkan pelayanan-pelayanan dalam proses pembayaran pajak maupun kewajiban lain sehingga mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak .
4. Sistem pemungutan pajak daerah lebih ditingkatkan dan dipantau dengan baik sehingga tidak terjadi *Potensial Lost* yang akan mempengaruhi penerimaan keuangan daerah Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2002)a. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

<http://skpd.batamkota.go.id>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

Mahsun, M., Firma Sulistiyowati dan Heribertus A.P. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Mohamad Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF.

Peraturan Daerah Kota Batam No. 5 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah Kota Batam*. Dinas Pendapatan Kota Batam.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia “Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sofyan Syafri Harahap. 2013. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Sri Widada. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengeolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Dinas Pendapatan Kota Batam.

Waluyo , dan Wirawan, B.I. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.